

**PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* PEMIDANAAN
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

Oleh:

Ayu Apriyana

201710115184



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

**PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* PEMIDANAAN
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

Oleh:

Ayu Apriyana

201710115184



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan *Double track system* Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana

Nama Mahasiswa : Ayu Apriyana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115184

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta , 6 Februari 2024

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Anggreany Haryani Putri S.H., M.H.
NIDN. 0319018502

Nina Zainab S.H, M.H.
NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan *Double track system* Pemidanaan
Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
Dalam Sistem Peradilan Pidana

Nama Mahasiswa : Ayu Apriyana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115184

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2024

Jakarta, 6 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN. 0319077606

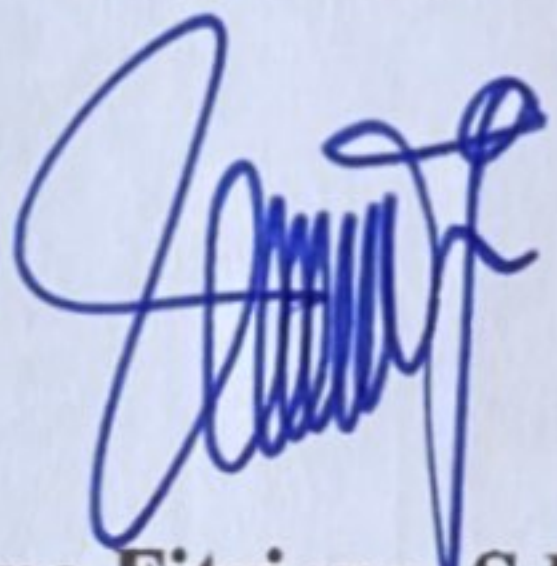
Penguji I : Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0319018502

Penguji II : Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.
NIDN. 8802323419

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 042403900

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum


Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ayu Apriyana
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115184
Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 24 April 1996
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penerapan Double Track System Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah di tuliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bekasi, 6 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Ayu Apriyana

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADMEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Apriyana
NPM : 201710115184
Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 24 April 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (databases), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu menerima ijin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab pribadi.

Bekasi, 6 Februari 2024
Yang Membuat Pernyataan



Ayu Apriyana

ABSTRAK

Ayu Apriyana. 201710115184. Penerapan *Double track system* Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penggunaan *double track system* dalam perundang-undangan pidana masih banyak memunculkan kerancuan, menimbulkan masalah ketidak konsistenan menetapkan jenis dan bentuk sanksi suatu produk perundang-undangan mencerminkan tidak kokohnya landasan yang dipakai sebagai dasar *double track system* dalam kebijakan legislasi selama ini. Penetapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam produk kebijakan legislasi selama ini, tidaklah konsisten menganut prinsip *double track system*. Selain penetapan kedua jenis sanksi tersebut tumpang tindih dalam berbagai perundang-undangan, juga ada kecenderungan memprioritaskan sanksi pidana sebagai yang utama, sementara sanksi tindakan sebagai sanksi yang terabaikan dalam perundang-undang pidana selama ini. Adapun rumusan masalah pertama bagaimana pengaturan *double track sistem* pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika berdasarkan sistem peradilan pidana dan bagaimana penerapan *double track system* terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau *library research* (penelitian kepustakaan, dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Pengaturan *double track sistem* pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika berdasarkan sistem peradilan pidana terkait pemberian sanksi bagi pengguna narkotika dalam Undang-Undang sebelumnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang penggantinya yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas *double track system* berupa kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Namun, pada kenyataannya hakim lebih sering memberikan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkotika daripada menjalani rehabilitasi.

Kata Kunci: *Double Track System*, Pemidanaan, Narkotika.

ABSTRACT

Ayu Apriyana. 201710115184. *Implementation of a double track system of punishment for perpetrators of narcotics abuse in the criminal justice system.*

In the double track system, the formulation of sanctions for narcotics abuse is a criminal law policy in the formulation of provisions governing the sanctions given to perpetrators of narcotics abuse, namely in the form of criminal sanctions and action sanctions. The use of the double track system in criminal legislation still creates a lot of confusion, giving rise to the problem of inconsistency in determining the type and form of sanctions for a legislative product, reflecting the lack of solidity of the foundation used as the basis of the double track system in legislative policy so far. The determination of criminal sanctions and action sanctions in legislative policy products so far has not consistently adhered to the principle of the double track system. Apart from the overlapping determination of these two types of sanctions in various laws, there is also a tendency to prioritize criminal sanctions as the main one, while action sanctions are a neglected sanction in criminal legislation so far. The first problem formulation is how to regulate the double track system of punishment for narcotics abusers based on the criminal justice system and how to apply the double track system to narcotics abusers.

This research method is normative juridical research or library research (library research, with the data source used in this research coming from written materials that have relevance to the problem of this research. The double track setting of the criminal system for narcotics abusers is based on the relevant criminal justice system. The provision of sanctions for narcotics users in the previous Law, Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics and its successor Law, namely Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, adheres to the principle of a double track system in the form of equality of criminal sanctions and action sanctions. However In fact, judges more often impose prison sentences on narcotics users than undergo rehabilitation

Keywords: *Double Track System, Punishment, Narcotics.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas penyelesaian skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara. Skripsi ini mengambil judul **“PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”**. Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ini menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, yaitu kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Sopian Matondang dan Ibu Mardiana Lubis, yang senantiasa menyalurkan semangat, doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik secara moril dan materil.
3. Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Diana Fitriana, S.H, M.H., Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Nina Zainab, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis Penulisan Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta Dosen Pembimbing akademik;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini;
8. Staf Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu saya selama perkuliahan;
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat saya tulis satu persatu;
10. Muhammad Fauzi Akbar suami saya yang senantiasa mendorong saya agar tetap melanjutkan kuliah sampai lulus;
11. Abhaya Daksha Azzahra anak saya yang semenjak masih didalam kandungan ikut menemani saya untuk menyelesaikan skripsi saya;
12. Rabiatul Adawiyah kakak saya yang selalu saya minta tolong sampai tuntasnya saya mengerjakan skripsi ini;
13. Irmansyah dan Roni Rizki adik saya yang sering saya minta tolong untuk mengantar saya;
14. Rahwindi Pangestu yang selalu memotivasi dan membantu saya untuk menyelesaikan skripsi saya;
15. Martha Cahya Simanjuntak dan Adyna Tsamara Zahra yang selalumenyemangati saya agar menyelesaikan kuliah saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka penulis dengan tangan terbuka mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua pihak yang membutuhkan khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Bekasi, 6 Februari 2024



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PERNYATAAN iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADMEMIS v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah 8

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian..... 8

1.3.1. Tujuan Penelitian 8

1.3.2. Kegunaan Penelitian 8

1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran. 9

1.4.1. Kerangka Konseptual 9

1.4.2 Kerangka Teoritis 11

1.4.3. Kerangka Pemikiran..... 16

1.5. Penelitian Terdahulu..... 18

1.6. Metode penelitian. 19

1.6.1. Pendekatan Penelitian 20

1.6.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 20

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 21

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum 22

BAB II 23

ANALISIS YURIDIS *DOUBLE TRACK SYSTEM* PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA..... 23

2.2. Tinjauan Umum *Double track system* dalam Hukum pidana di Indonesia..... 29

2.4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika..... 38

2.6. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana 49

BAB III PERKARA PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA... 53

3.1. Kasus Posisi..... 53

 3.1.1. Kasus Posisi Pengadilan Negeri Polewali Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pol.
 56

 3.1.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor
 96/Pid.Sus/2021/PN Pol..... 58

 3.1.3. Hasil Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pol
 63

 3.2.1. Kasus Posisi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
 399/PID.SUS/2020/PT.DKI 63

 3.2.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
 399/PID.SUS/2020/PT.DKI 65

 3.2.3. Hasil Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
 399/PID.SUS/2020/PT.DKI 69

BAB IV 70

**PENGATURAN MENGENAI *DOUBLE TRACK SYSTEM* PEMIDANAAN
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA 70**

4.1. Pengaturan *double track sistem* pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan
narkotika berdasarkan sistem peradilan pidana. 70

4.2. Penerapan *double track system* terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. .. 83

BAB V PENUTUP..... 99

5.1. Simpulan. 99

DAFTAR PUSTAKA..... 101

RIWAYAT HIDUP..... 1

“MOTTO”

“Ducunt Volentem Fata, Nolentem Trahunt”

**“Takdir Membimbing Mereka yang Mau dan
Menyeret Mereka yang Tidak Mau**

